



Kajian Filosofi dalam Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Pemikiran Jürgen Habermas

Akmal Firmansyah[✉], Samsuri

Yogyakarta State University

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: Juli 2025

Direvisi: September 2025

Diterima: November 2025

Keywords:

Deliberative Democracy;

Jürgen Habermas;

Communicative Action; Civic

Education; Public Space.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis relevansi pemikiran Jürgen Habermas dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang demokratis dan partisipatif. Permasalahan utama terletak pada dominasi pendekatan normatif-prosedural dalam pendidikan kewarganegaraan yang cenderung minim ruang bagi dialog kritis dan partisipasi deliberatif. Dengan menggunakan metode kajian pustaka filosofis dan analisis reflektif. Penelitian ini mengeksplorasi tiga konsep utama pemikiran Habermas, yaitu tindakan komunikatif, demokrasi deliberatif, dan ruang publik, sebagai kerangka teoritik untuk mereformulasi paradigma pendidikan kewarganegaraan. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip Habermasian ke dalam kurikulum dan praktik pedagogis dapat memperkuat kapasitas warga negara untuk berdialog secara rasional, menyelesaikan konflik nilai, dan berpartisipasi dalam ruang publik secara setara. Namun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi seperti resistensi budaya sekolah yang hierarkis, keterbatasan kompetensi guru, dan fragmentasi ruang digital. Simpulan dari studi ini menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis diskursus memiliki potensi untuk membentuk warga negara yang reflektif, kritis, dan bertanggung jawab secara sosial, serta menawarkan arah baru bagi kebijakan dan praktik pendidikan demokratis abad ke-21.

Abstract

This study aims to analyze philosophically the relevance of Jürgen Habermas' thought in the development of democratic and participatory civic education. The main problem lies in the dominance of the normative-procedural approach in civic education which tends to lack space for critical dialogue and deliberative participation. By using the philosophical literature review method and reflective analysis. This research explores three main concepts of Habermas' thought, namely communicative action, deliberative democracy, and public space, as a theoretical framework for reformulating the civic education paradigm. The results of the study show that the integration of Habermasian principles into curriculum and pedagogical practices can strengthen citizens' capacity to dialogue rationally, resolve value conflicts, and participate in the public sphere equally. However, there are challenges in implementation such as resistance to hierarchical school culture, limited teacher competence, and fragmentation of digital space. The conclusion of this study confirms that discourse-based civic education has the potential to shape reflective, critical, and socially responsible citizens, and offers a new direction for 21st century democratic education policy and practice.

© 2025 Universitas Negeri Semarang

[✉]Alamat korespondensi:

Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta
E-mail: akmalfirmansyah.2024@student.uny.ac.id

ISSN 2252-7133

E-ISSN 2548-4648

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu pedagogis yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas (Lonto, 2019; Aini, Abdulkarim, Sapriya, & Rahmat, 2023), bertanggung jawab (Gómez & Suárez, 2023; Ayane & Mihiretie, 2024) dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Arnot, Casely-Hayford & Yeboah, 2018). Secara substansial, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menyangkut pengetahuan tentang sistem politik, hukum, dan konstitusi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etis seperti keadilan, toleransi, dan tanggung jawab sosial dalam konteks kehidupan demokratis (Carleheden, 2006; Deakin Crick & Joldersma, 2007). Dalam kajian filosofis, pendidikan kewarganegaraan berpijak pada pandangan normatif tentang manusia sebagai makhluk rasional dan sosial yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan publik secara deliberatif. Oleh karena itu, landasan filosofis pendidikan kewarganegaraan mencakup pemikiran tentang kebebasan, otonomi moral, dan diskursus publik yang rasional (Sørensen, 2015; Lovat, 2013).

Dalam konteks ini, pemikiran filsuf kontemporer Jürgen Habermas menjadi sangat relevan. Habermas, seorang filsuf dan sosiolog asal Jerman, dikenal luas melalui kontribusinya dalam teori tindakan komunikatif (*Theory of Communicative Action*) dan teori diskursus moral (*Discourse Theory of Morality*) (Habermas, 1990; Finlayson & Rees, 2023). Ia menekankan pentingnya rasionalitas komunikatif dalam pembentukan opini dan kehendak publik dalam masyarakat demokratis. Dalam pandangannya, demokrasi tidak semata-mata praktik prosedural, melainkan proses deliberatif yang berakar pada diskursus rasional antarwarga negara yang setara (Habermas, 1992; Englund, 2006). Dengan demikian, Habermas memberikan fondasi teoretis yang kokoh bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang demokratis, kritis, dan dialogis (Morrison, 2002; Susen, 2021).

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis bagaimana pemikiran Jürgen

Habermas dapat dijadikan kerangka teoritik dalam pendidikan kewarganegaraan. Fokus kajian mencakup eksplorasi konsep rasionalitas komunikatif, ruang publik (*public sphere*), dan demokrasi deliberatif, serta implikasinya terhadap pembelajaran kewarganegaraan di ruang kelas maupun dalam kehidupan sosial (Englund, 2006; Deakin Crick & Joldersma, 2007). Kajian ini juga mencoba menilai sejauh mana pendekatan Habermasian mampu memperkaya dimensi etis, politik, dan pedagogis dalam pendidikan kewarganegaraan modern. Dengan menggali dimensi filosofis ini, diharapkan kajian ini mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap perumusan paradigma pendidikan kewarganegaraan yang lebih partisipatif dan reflektif (Sørensen, 2015; Lovat, 2013).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian filsafat (*philosophical inquiry*), yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam gagasan-gagasan Jürgen Habermas dan relevansinya dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendekatan ini dipilih karena sifat permasalahan yang bersifat normatif dan teoritis, yakni untuk menelaah dasar-dasar konseptual dan etis dalam pembentukan warga negara demokratis melalui pendidikan.

Metodologi yang digunakan adalah analisis filsafat kritis, yang melibatkan interpretasi konseptual terhadap karya-karya primer dan sekunder, serta refleksi argumentatif terhadap asumsi-asumsi normatif dalam praktik pendidikan kewarganegaraan. Fokus utama diarahkan pada tiga konsep kunci pemikiran Habermas: tindakan komunikatif, demokrasi deliberatif, dan ruang publik.

Data dikumpulkan melalui studi literatur mendalam terhadap, karya-karya primer Habermas seperti *The Theory of Communicative Action* (1984), *Between Facts and Norms* (1996), dan *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1989). Sumber sekunder berupa jurnal ilmiah internasional terindeks, buku-buku akademik, dan artikel kajian yang relevan dengan topik

pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif filsafat dan teori kritis, khususnya yang terbit antara tahun 2020 hingga 2025. Data lainnya dapat diperoleh melalui dokumen kebijakan dan kurikulum pendidikan kewarganegaraan, baik nasional maupun internasional, yang dianalisis untuk menilai keterkaitan atau penerapan prinsip Habermasian. Pencarian dan seleksi literatur dilakukan secara sistematis melalui database akademik seperti JSTOR, Taylor & Francis, SpringerLink, Google Scholar, serta arsip digital Habermas dan perpustakaan daring universitas.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sistematis. Pertama, tahap interpretasi konseptual. Mengkaji dan mengklarifikasi makna filosofis dari konsep Habermas dalam konteks pendidikan. Kedua, tahap kontekstualisasi normatif. Mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan prinsip dan praktik pendidikan kewarganegaraan, baik secara teoretis maupun dalam kebijakan. Ketiga, tahap refleksi kritis. Mengevaluasi kekuatan, relevansi, serta keterbatasan gagasan Habermas dalam penerapannya terhadap pendidikan kewarganegaraan abad ke-21. Teknik analisis yang digunakan mencakup analisis tematik, identifikasi argumen filosofis, serta penarikan implikasi teoretis dan praktis berdasarkan sintesis pemikiran yang tersedia.

PEMBAHASAN

Pemikiran Jürgen Habermas memberikan fondasi filosofis yang kuat bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang demokratis dan partisipatif. Tiga konsep utama dari Habermas yang sangat relevan untuk konteks pendidikan kewarganegaraan adalah tindakan komunikatif, demokrasi deliberatif, dan ruang publik. Ketiganya membentuk kerangka normatif yang mendorong partisipasi warga secara rasional, reflektif, dan etis dalam kehidupan publik.

Tindakan komunikatif dan perannya dalam diskusi Demokratis

Konsep tindakan komunikatif (*komunikatives Handeln*) merupakan kontribusi sentral Habermas dalam *The Theory of Communicative Action* (Habermas, 1984). Dalam

tindakan komunikatif, individu bertindak tidak hanya untuk mencapai tujuan instrumental, tetapi untuk mencapai pengertian bersama melalui argumentasi rasional dalam konteks sosial yang setara. Komunikasi bukan sekadar pertukaran informasi, tetapi sebagai proses rasional yang diarahkan pada validitas klaim dan kesepahaman bersama.

Berbeda dengan tindakan instrumental, yang bertujuan untuk memanipulasi objek demi mencapai tujuan tertentu, tindakan komunikatif berlandaskan pada pertukaran argumen secara rasional dalam situasi yang bebas dari dominasi. Dalam tindakan ini, pembicara mengajukan klaim kebenaran (*truth*), kebenaran normatif (*rightness*), dan kejujuran (*truthfulness*) yang terbuka untuk diuji dan diperdebatkan oleh semua partisipan secara setara (Habermas, 1990).

Dalam konteks diskusi demokratis, tindakan komunikatif memainkan peran esensial sebagai mekanisme pembentukan opini publik yang rasional dan partisipatif. Demokrasi tidak sekadar ditentukan oleh prosedur elektoral atau institusi formal, tetapi oleh kualitas dialog publik yang berlangsung dalam ruang deliberatif. Ketika warga negara berdiskusi tentang isu-isu publik berdasarkan argumen dan bukan kepentingan strategis semata, mereka berperan aktif dalam proses pembentukan kehendak kolektif yang sah (*legitimate will formation*) (Habermas, 1996).

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, pendekatan ini menempatkan dialog antarwarga sebagai inti dari kehidupan demokratis. Guru dan siswa tidak lagi hanya mentransmisikan atau menerima informasi politik, tetapi saling berdialog dalam kerangka rasional dan etis. Hal ini memperkuat kapasitas peserta didik untuk menilai klaim politik secara kritis dan membentuk opini publik secara bertanggung jawab (Englund, 2006; Deakin Crick & Joldersma, 2007).

Penerapan prinsip tindakan komunikatif dalam pendidikan kewarganegaraan mendorong pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek rasional yang setara. Guru bukan satunya sumber kebenaran, melainkan fasilitator dialog yang membuka ruang bagi perbedaan,

kritik, dan konsensus melalui komunikasi terbuka. Dengan demikian, ruang kelas menjadi cerminan miniatur demokrasi, tempat di mana warga negara muda belajar bagaimana menjadi bagian dari komunitas politik yang deliberatif dan bertanggung jawab (Englund, 2006; Deakin Crick & Joldersma, 2007).

Habermas menekankan bahwa rasionalitas komunikatif berbeda dari rasionalitas strategis karena mengandaikan kesetaraan partisipan, ketiadaan paksaan, dan keterbukaan terhadap argumen terbaik (Habermas, 1990). Proses pendidikan yang mendorong bentuk komunikasi ini akan mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi dalam deliberasi demokratis secara bermakna.

Lebih jauh, tindakan komunikatif memperkuat dimensi etis dalam diskusi demokratis, karena setiap partisipan tidak hanya berusaha meyakinkan, tetapi juga bersedia mendengarkan dan mengubah pendapatnya bila berhadapan dengan argumen yang lebih baik. Hal ini menciptakan basis moral bagi kesetaraan, inklusi, dan penghormatan terhadap pluralisme dalam masyarakat demokratis.

Demokrasi Deliberatif dan Dampaknya pada Pendidikan

Demokrasi deliberatif adalah model demokrasi yang menekankan pentingnya proses diskusi rasional dan partisipatif dalam pembentukan kehendak politik bersama. Gagasan ini dikembangkan secara mendalam oleh Jürgen Habermas pada karya bukunya yang berjudul *Between Facts and Norms* (1996), di mana ia menyatakan bahwa legitimasi demokratis tidak hanya berasal dari prosedur formal seperti pemilu, tetapi juga dari komunikasi publik yang bebas, inklusif, dan berlandaskan pada argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demokrasi deliberatif juga dimaknai sebagai kelanjutan logis dari rasionalitas komunikatif dalam ranah politik. Habermas memformulasikan model demokrasi ini sebagai alternatif dari demokrasi elektoral prosedural yang cenderung elitis. Dalam demokrasi deliberatif, pembentukan kehendak kolektif terjadi melalui partisipasi diskursif warga negara

dalam ruang publik yang terbuka, setara, dan reflektif (Habermas, 1996).

Pendidikan kewarganegaraan dalam kerangka ini bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan deliberatif: berpikir kritis, menyampaikan pendapat, mendengarkan argumen pihak lain, serta mencapai kompromi rasional. Pendidikan tidak sekadar menanamkan nilai, tetapi harus menjadi laboratorium demokrasi di mana siswa mengalami dan mempraktikkan prosedur deliberatif (Sørensen, 2015; Morrison, 2002).

Konsep demokrasi deliberatif memiliki implikasi langsung dan mendalam terhadap pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan. Pertama, demokrasi deliberatif menggeser paradigma pendidikan dari sekadar transmisi pengetahuan politik menjadi proses pembentukan kompetensi deliberative, yaitu kemampuan untuk berdiskusi, berpikir kritis, menilai argumen, dan mengambil keputusan kolektif secara etis dan rasional (Englund, 2006).

Kedua, prinsip deliberatif mendorong pengembangan ruang kelas sebagai arena publik mikro, di mana siswa dapat belajar menjadi warga negara melalui pengalaman langsung dalam praktik dialog demokratis. Dalam ruang ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang setara untuk berpendapat, bertanya, dan mengemukakan argumen berdasarkan alasan, bukan kekuasaan atau otoritas (Lovat, 2013).

Ketiga, demokrasi deliberatif memperkuat dimensi etis pendidikan. Pendidikan bukan sekadar instrumen negara untuk membentuk loyalitas politik, tetapi sebagai ruang kritis untuk menguji norma, kebijakan, dan praktik sosial berdasarkan prinsip keadilan dan rasionalitas publik. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya ingin menciptakan warga yang patuh hukum, tetapi warga yang reflektif, kritis, dan bertanggung jawab secara sosial (Sørensen, 2015; Deakin Crick & Joldersma, 2021).

Namun, penerapan prinsip demokrasi deliberatif dalam pendidikan juga menghadapi

tantangan, seperti kultur sekolah yang hierarkis, keterbatasan waktu kurikulum, dan rendahnya pelatihan guru dalam metode diskursus. Oleh karena itu, penerapan gagasan ini memerlukan komitmen sistemik untuk membangun kultur sekolah yang dialogis dan demokratis.

Menurut Habermas, hanya warga negara yang mampu berpartisipasi dalam diskursus rasional yang dapat menjalankan peran politiknya secara sah. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan deliberatif bukan hanya soal kurikulum, tetapi juga soal metode dan praktik pedagogis. Hal ini membutuhkan transformasi ruang kelas menjadi arena publik mikro di mana praktik diskursus dilatih secara sistematis (Lovat, 2013; Englund, 2006).

Ruang publik dan kaitannya dengan keterlibatannya masyarakat

Konsep ruang publik (*Öffentlichkeit*) pertama kali dijelaskan secara mendalam oleh Habermas dalam *The Structural Transformation of the Public Sphere* (Habermas, 1992). Ia menggambarkan ruang publik sebagai arena sosial di mana individu secara kolektif membentuk opini melalui debat rasional yang bebas dari dominasi negara dan pasar. Ruang publik adalah prasyarat bagi demokrasi deliberatif karena di sinilah kehendak politik kolektif dibentuk.

Ruang publik bukanlah ruang fisik semata, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk oleh komunikasi antarwarga yang setara dan deliberatif. Di sinilah terbentuk opini publik yang menjadi dasar legitimasi dalam masyarakat demokratis. Dalam kerangka normatif Habermas, keterlibatan warga dalam ruang publik tidak bersifat pasif, melainkan aktif, reflektif, dan komunikatif. Sehingga, melalui diskusi yang berlandaskan argumen, bukan kekuasaan (Habermas, 1996).

Ruang publik yang sehat membutuhkan warganegara yang terdidik dan reflektif, yang tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen argumen. Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam membentuk kompetensi komunikasi politik dan literasi publik. Dalam konteks ini, ruang kelas, media sosial, forum komunitas, dan

lembaga pendidikan dapat dianggap sebagai bagian dari ruang publik yang diperluas (Susen, 2021; Carlecheden, 2006).

Ruang publik menjadi prasyarat bagi partisipasi warga negara dalam kehidupan politik dan sosial. Masyarakat yang memiliki ruang publik yang sehat akan melahirkan warga negara yang lebih terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan kolektif, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta pembentukan norma sosial yang adil. Dengan kata lain, ruang publik adalah media utama keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi deliberatif (Susen, 2021; Deakin Crick & Joldersma, 2007).

Pendidikan yang terintegrasi dengan konsep ruang publik menolak pendekatan *top-down* yang dominatif, dan sebaliknya, mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah sosial. Hal ini memungkinkan partisipasi warga dalam diskursus publik yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan kolektif (Deakin Crick & Joldersma, 2007; Habermas, 1992).

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, ruang publik memiliki peran strategis. Sekolah, media, komunitas lokal, dan bahkan ruang digital dapat dijadikan sebagai bagian dari ruang publik yang mendidik. Melalui ruang-ruang ini, peserta didik dan masyarakat luas belajar bagaimana menyampaikan pendapat, mendengar sudut pandang berbeda, dan membangun konsensus sosial. Ini mencerminkan pentingnya pendidikan yang tidak terbatas di ruang kelas, tetapi meluas ke masyarakat sebagai ekosistem demokratis (Tytar et al., 2022).

Secara keseluruhan, pemikiran Habermas mengarahkan pendidikan kewarganegaraan ke arah transformasi demokratis yang berbasis diskursus. Pendidikan bukan hanya sarana pembinaan loyalitas terhadap negara, melainkan wahana pembentukan warga kritis yang mampu berpikir reflektif, bertindak deliberatif, dan berpartisipasi aktif dalam ruang publik. Dengan menggunakan kerangka teori tindakan komunikatif, demokrasi deliberatif, dan ruang publik, pendekatan Habermas menawarkan

paradigma filosofis yang integral dan transformatif untuk merancang pendidikan kewarganegaraan di abad ke-21.

Namun, tantangan kontemporer terhadap ruang publik juga harus diperhatikan. Fragmentasi media sosial, komodifikasi informasi, dan polarisasi ideologis mengancam kualitas diskursus publik. Situasi ini menuntut pendidikan kewarganegaraan yang mampu membekali warga dengan kemampuan literasi digital, etika komunikasi, dan keberanian moral untuk terlibat dalam dialog publik yang sehat dan konstruktif (Lovat, 2013).

Pemikiran Habermas dan Pendidikan Kewarganegaraan

Jürgen Habermas merupakan salah satu filsuf kontemporer terpenting yang kontribusinya sangat besar dalam memahami dinamika demokrasi, diskursus publik, dan pendidikan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), pemikiran Habermas menjadi landasan teoritis bagi pembelajaran yang mendorong partisipasi, refleksi kritis, dan rasionalitas komunikatif dalam masyarakat demokratis.

Salah satu studi paling berpengaruh dalam menjembatani teori Habermas dan pendidikan kewarganegaraan adalah karya Englund (2006) yang meskipun klasik, dikembangkan lebih lanjut dalam konteks pasca-2020 oleh peneliti seperti Tytar, Fradkina, Havryliuk, & Alimova (2022) dan Lovat (2013). Mereka menekankan pentingnya mengintegrasikan tindakan komunikatif ke dalam ruang kelas untuk membentuk warga yang tidak hanya pasif secara politik, tetapi mampu menegosiasikan nilai dan keputusan secara deliberatif (Tytar et al., 2022).

Selain itu, peneliti lainnya seperti Susen (2021) menjelaskan bagaimana teori diskursus Habermas memberikan kerangka normatif bagi pemikiran politik dan etika publik di ranah pendidikan. Rasionalitas komunikatif yang dikembangkan Habermas memberikan alternatif terhadap model pendidikan normatif-otoritatif dan memperkuat gagasan pendidikan sebagai praktik deliberatif.

Studi lain oleh Deakin Crick & Joldersma (2007) menyoroti bagaimana lifelong learning dalam perspektif Habermas dapat menguatkan

pendidikan kewarganegaraan sebagai proses seumur hidup, dengan penekanan pada keterlibatan publik yang berkesinambungan. Mereka juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip diskursus dapat digunakan sebagai perangkat evaluasi etis dalam pengambilan kebijakan pendidikan.

Penelitian Sørensen (2015) menambahkan dimensi Bildung atau pembentukan diri yang erat dengan tujuan pendidikan dalam perspektif Jerman, dan menyandingkan konsep ini dengan demokrasi deliberatif ala Habermas untuk menegaskan perlunya pendidikan moral-politik yang mendalam.

Pendidikan Kewarganegaraan pada konteks era digitalisasi dan pasca-pandemi *Covid-19*, peneliti lainnya seperti Finlay, Eastman & Kobayashi (2023) dan Gargroetzi, Zummo, Aguilar, & Bene (2025) menekankan urgensi dari ruang publik digital sebagai perluasan ruang deliberatif. Pendidikan kewarganegaraan modern tidak bisa lagi bersandar hanya pada kelas konvensional, melainkan perlu memasuki ruang digital di mana wacana politik dan formasi opini berlangsung secara masif dan cepat.

Perbandingan berbagai pemikiran tokoh lainnya tentang Pendidikan Kewarganegaraan

Seiring berkembangnya pendidikan kewarganegaraan, beberapa aliran filosofis telah memberi kontribusi konseptual yang signifikan. Pemikiran Habermas sering dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan lain, seperti liberalisme Rawlsian, komunitarianisme ala Charles Taylor, dan teori kritis Paulo Freire.

Pertama, Habermas vs. Rawls. Keduanya menekankan rasionalitas dan keadilan, namun Rawls lebih fokus pada struktur kelembagaan dan prinsip *veil of ignorance*, sementara Habermas menekankan diskursus publik sebagai sarana pembentukan legitimasi politik (Susen, 2021). Dalam konteks pendidikan, Rawls mendukung pendidikan moral berbasis keadilan distributif, sedangkan Habermas mengutamakan pembentukan kehendak melalui komunikasi reflektif.

Kedua, Habermas vs. Freire. Konsep pendidikan Paulo Freire melihat pendidikan sebagai praktik pembebasan, yang menyerukan

kesadaran kritis dan perlawanan terhadap struktur opresif (Torres & Morrow, 2021). Meski Freire lebih berorientasi praksis dan Habermas teoritik, keduanya mendukung dialog sebagai proses pembelajaran. Perbedaannya terletak pada dasar ontologis: Habermas bertumpu pada rasionalitas linguistik, Freire pada pengalaman eksistensial kaum tertindas.

Ketiga, Habermas vs. Komunitarianisme. Konsep aliran komunitarian seperti Taylor dan Etzioni menekankan pentingnya nilai-nilai komunitas dalam membentuk warga negara. Habermas, sebaliknya, bersifat lebih universalistik dan prosedural. Bagi Habermas, identitas politik warga negara dibentuk bukan dari warisan kultural tertentu, tetapi dari partisipasi aktif dalam diskursus demokratis (Habermas, 1996).

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan Habermasian dalam pendidikan kewarganegaraan menekankan keterbukaan diskursif, kesetaraan partisipasi, dan rasionalitas argumentatif, yang menjadikannya relevan dalam masyarakat pluralistik dan demokratis.

Kesenjangan dalam Penelitian dan bidang yang perlu dieksplorasi lebih lanjut

Meskipun teori Habermas telah banyak diaplikasikan dalam wacana pendidikan, terdapat beberapa kesenjangan dalam penelitian yang penting untuk ditinjau lebih lanjut. Pertama, keterbatasan praktis dalam implementasi diskursus. Banyak studi menekankan nilai ideal rasionalitas komunikatif, tetapi sedikit yang berhasil mengevaluasi secara empirik bagaimana diskursus deliberatif dapat benar-benar diterapkan dalam konteks kelas, khususnya di sistem pendidikan yang hierarkis atau otoritatif. Kesenjangan ini tampak dalam riset-riset yang terlalu teoretis tanpa menyentuh pedagogi mikro (Lovat, 2013).

Kedua, ketimpangan digital dan ruang publik virtual. Ruang publik dalam era digital mengalami transformasi besar. Sayangnya, penelitian tentang bagaimana rasionalitas komunikatif diterapkan dalam platform digital (misalnya media sosial) masih belum memadai. Penelitian Susen (2021) dan Tytar et al. (2022)

sudah mulai mengarah ke sini, namun masih perlu ditelusuri secara sistematis terutama dalam konteks pendidikan formal dan informal.

Ketiga, perbandingan kontekstual Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagian besar literatur Habermas berakar dari konteks Eropa Barat. Implikasi teorinya terhadap pendidikan kewarganegaraan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, masih terbatas. Perlu dilakukan studi lintas budaya untuk mengevaluasi validitas dan adaptabilitas kerangka Habermas di luar tradisi demokrasi liberal.

Keempat, integrasi konsep pemikiran Habermas dengan pendidikan multikultural. Habermas sering dikritik karena terlalu menekankan rasionalitas formal dan mengabaikan perbedaan kultural. Perlu dikaji lebih dalam bagaimana prinsip diskursus dapat dipadukan dengan penghormatan terhadap identitas lokal dan pluralisme nilai dalam pendidikan kewarganegaraan multikultural (Deakin Crick & Joldersma, 2007).

Kelima, penilaian dan evaluasi pembelajaran dalam kurikulum. Belum banyak riset yang menggali bagaimana teori diskursus dapat digunakan untuk membentuk instrumen evaluasi pendidikan kewarganegaraan. Aspek etis deliberasi seperti keterbukaan terhadap kritik, empati rasional, dan akuntabilitas partisipatif belum diformulasikan sebagai indikator kurikulum secara sistematis.

Literatur terkini, yang sudah peneliti paparkan tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Habermas tetap relevan dan penting dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai-nilai demokratis. Rasionalitas komunikatif, demokrasi deliberatif, dan ruang publik memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk membangun paradigma pendidikan partisipatif.

Namun demikian, terdapat kesenjangan signifikan dalam praktik implementatif, integrasi multikultural, dan penerapan di era digital. Penelitian ke depan sebaiknya diarahkan pada pendekatan empiris terhadap praktik deliberatif di ruang kelas, pengembangan instrumen pedagogis berbasis diskursus, serta eksplorasi

lebih luas dalam konteks pendidikan negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Pemikiran Jürgen Habermas, khususnya mengenai rasionalitas komunikatif, demokrasi deliberatif, dan ruang publik, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan paradigma pendidikan kewarganegaraan kontemporer. Dalam konteks kebijakan pendidikan, teori Habermas menawarkan pendekatan normatif yang menempatkan dialog, kesetaraan partisipatif, dan kritik rasional sebagai landasan utama dalam membentuk warga negara demokratis.

Analisis bagaimana pemikiran Habermas mempengaruhi kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan

Pemikiran diskursus Habermas secara tidak langsung memengaruhi kebijakan pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara, khususnya dalam pergeseran dari model pendidikan normatif-prosedural menuju pendekatan yang partisipatif dan reflektif. Misalnya, banyak kurikulum di Eropa dan Australia yang kini menekankan pengembangan kompetensi deliberatif, seperti berpikir kritis, kemampuan berdialog, dan partisipasi aktif dalam ruang publik sekolah (Lovat, 2013).

Secara konkret, pengaruh Habermas terlihat dalam dimasukkannya prinsip-prinsip demokrasi deliberatif ke dalam dokumen kebijakan dan kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Banyak negara demokratis, termasuk negara-negara Eropa dan Australia, telah mengadopsi pendekatan yang menekankan pengembangan kompetensi kewarganegaraan aktif, yaitu kemampuan berpikir kritis, berdiskusi, menghargai pluralitas, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sosial (Lovat, 2013; Deakin Crick & Joldersma, 2007). Model ini selaras dengan teori diskursus Habermas, di mana kewarganegaraan tidak sekadar bersifat legal-formal, tetapi juga komunikatif-reflektif.

Pendekatan ini juga tercermin dalam dokumen UNESCO dan OECD, yang menekankan pentingnya pendidikan demokratis berbasis diskursus (Susen, 2021). Kurikulum tidak lagi hanya mengajarkan isi politik formal,

tetapi juga menekankan pembentukan kesadaran etis melalui partisipasi aktif siswa dalam pemecahan masalah sosial. Ini sejalan dengan gagasan Habermas bahwa warga negara yang rasional adalah mereka yang mampu berdialog dan menguji klaim kebenaran melalui argumentasi terbuka (Habermas, 1996).

Dalam konteks Indonesia, meskipun belum secara eksplisit merujuk pada Habermas, semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab secara sosial sejalan dengan prinsip-prinsip diskursus Habermasian. Revisi kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka juga telah mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan dialog, yang mengarah pada penguatan kompetensi deliberatif peserta didik.

Namun demikian, penerapan nilai-nilai Habermas dalam kebijakan pendidikan kewarganegaraan menghadapi sejumlah tantangan struktural. Budaya sekolah yang masih hierarkis, dominasi pendekatan hafalan, serta keterbatasan kapasitas guru dalam memfasilitasi diskusi yang setara menjadi hambatan utama. Selain itu, kebijakan yang terlalu terpusat dan cenderung formalistik sering kali gagal menangkap dimensi etis-komunikatif yang ditekankan Habermas (Sørensen, 2015; Susen, 2021).

Oleh karena itu, pengaruh pemikiran Habermas terhadap kebijakan pendidikan kewarganegaraan bukan hanya bersifat konseptual, tetapi juga menuntut transformasi struktural dan pedagogis. Habermas menawarkan kerangka normatif yang kuat untuk menilai dan merancang kebijakan pendidikan yang tidak hanya menekankan kepatuhan warga terhadap hukum, tetapi juga kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam ruang publik secara kritis, rasional, dan etis. Dalam kerangka ini, pendidikan kewarganegaraan menjadi instrumen pembentukan warga negara deliberative, mereka yang tidak hanya tahu hukum, tetapi juga mampu memperdebatkan dan memformulasikan hukum secara demokratis.

Evaluasi implementasi praktis dari pemikiran Habermas dalam lingkungan Pendidikan

Secara praktis, beberapa sistem pendidikan telah mencoba mengimplementasikan prinsip Habermasian dalam bentuk *classroom deliberation*, *service learning*, dan forum-forum diskusi publik siswa. Dalam model pembelajaran berbasis proyek atau diskursus, siswa dilatih untuk mendiskusikan isu-isu publik, menilai argumen secara kritis, serta menyampaikan pendapat berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (Deakin Crick & Joldersma, 2007).

Contoh implementasi semacam ini dapat ditemukan di program *philosophy for children* (P4C) dan *deliberative pedagogy*, yang terbukti meningkatkan kompetensi demokratis siswa (Sørensen, 2015). Selain itu, prinsip ruang publik juga mulai diterapkan melalui media digital sekolah, seperti blog kelas, forum daring, dan kegiatan pemilu siswa, yang semuanya membuka peluang bagi partisipasi deliberatif dalam konteks pendidikan.

Evaluasi terhadap implementasi ini menunjukkan sejumlah keberhasilan. Pertama, model pembelajaran berbasis diskursus mampu meningkatkan kompetensi komunikasi politik siswa, seperti kemampuan menyampaikan pendapat, mendengarkan secara empatik, serta membangun argumen berdasarkan fakta dan nilai. Kedua, pendekatan ini meningkatkan motivasi belajar dan kesadaran sosial, karena siswa merasa dilibatkan secara nyata dalam proses pembentukan opini dan pengambilan keputusan (Sørensen, 2015).

Namun, implementasi praktis pemikiran Habermas di lingkungan pendidikan juga menghadapi tantangan serius. Salah satu hambatan utama adalah budaya sekolah yang masih bersifat hierarkis, di mana relasi gurusiwa sering kali vertikal dan tidak mendukung terciptanya dialog yang setara. Dalam kondisi ini, komunikasi cenderung bersifat satu arah, dan proses diskursus menjadi simbolik belaka (Lovat, 2013).

Tantangan lain adalah keterbatasan pelatihan guru dalam metodologi deliberatif. Banyak pendidik belum memiliki keterampilan

pedagogis untuk memfasilitasi diskusi reflektif atau mengelola perbedaan opini secara konstruktif. Kurangnya sumber daya, tekanan kurikulum yang padat, serta penilaian yang berorientasi hasil kognitif juga menjadi hambatan dalam menerapkan pembelajaran berbasis diskursus secara berkelanjutan.

Di era digital, ruang publik pendidikan juga diperluas ke ranah daring. Media sosial, platform pembelajaran digital, dan forum online menyediakan ruang baru untuk praktik deliberatif. Namun, fragmentasi informasi, polarisasi opini, dan retorika populis di ruang digital menjadi tantangan baru yang menuntut pendidikan kewarganegaraan berbasis literasi digital, etika komunikasi, dan penguatan prinsip discourse ethics ala Habermas (Susen, 2021).

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi gagasan Habermas dalam pendidikan tidak cukup dengan revisi kurikulum, tetapi juga membutuhkan reformasi budaya institusional, pelatihan guru berkelanjutan, dan desain sistem evaluasi yang mendukung keterampilan deliberatif. Pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan nilai-nilai Habermasian dapat menjadi sarana strategis untuk membentuk generasi warga negara yang reflektif, kritis, dan partisipatif sebagai syarat utama bagi keberlanjutan demokrasi.

Prinsip-prinsip Habermasian di Pendidikan Kewarganegaraan era modern atau abad 21

Dalam era modern yang ditandai oleh kompleksitas global, digitalisasi informasi, dan meningkatnya pluralitas nilai, pendidikan kewarganegaraan menghadapi tantangan yang tidak bisa dijawab hanya dengan pendekatan tradisional berbasis hafalan norma atau pengetahuan prosedural. Pemikiran Jürgen Habermas menawarkan landasan filosofis yang kuat untuk merancang pendidikan kewarganegaraan yang lebih dialogis, reflektif, dan partisipatif. Prinsip-prinsip Habermasian ini menjadi semakin relevan dalam menjawab kebutuhan warga negara abad ke-21 yang diharapkan tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu berkontribusi secara aktif dalam kehidupan publik.

Habermas menempatkan tindakan komunikatif sebagai bentuk interaksi sosial yang menekankan pencapaian kesepahaman bersama melalui dialog rasional yang bebas dari dominasi. Dalam pendidikan kewarganegaraan, prinsip ini mengubah ruang kelas menjadi arena diskursif, di mana siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi dilatih untuk berdialog, berargumentasi, dan menyelesaikan konflik nilai melalui komunikasi yang setara dan terbuka (Habermas, 1984; Englund, 2006).

Habermas mengembangkan konsep demokrasi deliberatif, yaitu demokrasi yang didasarkan pada diskusi publik yang rasional dan inklusif. Pendidikan kewarganegaraan modern yang berlandaskan prinsip ini bertujuan membentuk warga negara yang mampu terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara etis dan kritis, bukan sekadar mengikuti arus mayoritas atau otoritas formal. Siswa diajak untuk membahas isu-isu publik, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan membentuk opini melalui proses deliberatif (Habermas, 1996; Lovat, 2013).

Habermas menekankan bahwa validitas klaim moral tidak ditentukan oleh otoritas eksternal, melainkan oleh penerimanya dalam komunitas diskursus. Dengan kata lain, nilai moral dalam pendidikan harus diuji melalui argumen yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Etika ini mendorong siswa untuk menghargai perbedaan, mendengarkan secara empatik, dan mengembangkan orientasi moral yang tidak dogmatis, tetapi terbuka terhadap rasionalitas publik (Habermas, 1990).

Pendidikan kewarganegaraan abad ke-21 tidak hanya berlangsung di ruang kelas formal, tetapi juga dalam ruang publik digital dan komunitas lokal. Habermas memandang ruang publik sebagai tempat warga negara membentuk opini kolektif secara bebas. Oleh karena itu, pendidikan harus mendorong keterlibatan siswa dalam forum-forum publik, baik secara langsung maupun daring, sebagai bentuk praksis kewarganegaraan aktif (Habermas, 1989; Susen, 2021). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Abad21 berfokus pada pengembangan Keterampilan Abad 21 (berpikir kritis, kreatif,

komunikasi, kolaborasi) dan kecerdasan kewarganegaraan (civic intelligence) untuk membentuk warga negara global yang aktif, adaptif, dan berkarakter, siap menghadapi tantangan kompleks dunia modern melalui pendekatan pembelajaran aktif (student-centered) seperti Problem Based Learning dan integrasi literasi digital, dengan tujuan menciptakan smart citizen dan good citizen.

Dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi, prinsip-prinsip Habermasian harus diterjemahkan ke dalam konteks ruang publik virtual. Tantangan seperti disinformasi, polarisasi, dan debat yang tidak rasional menjadi hambatan utama dalam mewujudkan diskursus deliberatif di dunia maya. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan abad ke-21 harus mengembangkan literasi digital deliberatif, yaitu kemampuan untuk menilai informasi secara kritis, berpartisipasi dalam diskusi daring secara etis, dan membedakan antara argumentasi rasional dengan manipulasi emosional (Tytar et al., 2022; Deakin Crick & Joldersma, 2021).

Penerapan prinsip-prinsip Habermas dalam pendidikan kewarganegaraan abad ke-21 menghadapi tantangan struktural dan kultural yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah fragmentasi ruang publik digital. Media sosial dan platform daring memang menciptakan ruang diskursus baru, tetapi sekaligus membuka peluang polarisasi, disinformasi, dan retorika emosional yang bertolak belakang dengan prinsip rasionalitas komunikatif (Habermas, 2022).

Tantangan lain adalah dominasi kurikulum yang masih berorientasi pada penguasaan konten dan pengujian standar. Dalam lingkungan pendidikan yang sangat terukur, ruang untuk dialog reflektif menjadi terbatas. Guru pun kerap mengalami tekanan waktu dan beban administratif, sehingga praktik diskursus deliberatif menjadi sulit diterapkan (Lovat, 2013).

Lebih jauh, sistem sosial-politik yang otoriter atau tidak demokratis dapat menjadi penghambat utama dalam menerapkan prinsip-prinsip Habermasian secara otentik. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan justru

bisa dijadikan alat kontrol ideologis daripada pembebasan partisipatif (Susen, 2021).

Oleh karena itu, meskipun teori Habermas sangat relevan sebagai kerangka normatif, penerapannya membutuhkan transformasi sistemik: reformasi kurikulum, pelatihan guru dalam pedagogi diskursus, dan pelembagaan ruang publik yang lebih demokratis di institusi pendidikan.

SIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa pemikiran Jürgen Habermas memberikan kerangka filosofis yang kokoh bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang demokratis, reflektif, dan partisipatif. Konsep utama seperti tindakan komunikatif, demokrasi deliberatif, dan ruang publik menyajikan paradigma pendidikan yang tidak sekadar berfokus pada transmisi pengetahuan politik, tetapi menumbuhkan kemampuan berdiskursus, berpikir kritis, dan membentuk kehendak kolektif melalui proses komunikasi rasional.

Temuan utama menunjukkan bahwa teori Habermas memiliki relevansi tinggi dalam merancang kurikulum kewarganegaraan yang lebih dialogis, inklusif, dan berbasis nilai demokrasi substantif. Beberapa model pembelajaran seperti forum deliberatif dan pembelajaran berbasis masalah mencerminkan aplikasi praktis dari prinsip Habermasian. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, mulai dari struktur kurikulum yang rigid, keterbatasan pelatihan guru, hingga dominasi ruang digital yang belum sepenuhnya deliberatif.

Arah penelitian ke depan perlu difokuskan pada dua hal utama: (1) studi empiris yang mengevaluasi efektivitas pendekatan diskursif dalam kelas kewarganegaraan, serta (2) eksplorasi adaptasi teori Habermas dalam konteks lokal, khususnya pada negara-negara di berbagai benua di dunia seperti Indonesia, Cina, Australia, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain, dengan mempertimbangkan pluralisme budaya dan dinamika politik yang khas.

Bagi pendidik, pendekatan Habermasian menuntut transformasi peran dari pengajar menjadi fasilitator diskursus. Sementara bagi pembuat kebijakan, implikasinya adalah perlunya dukungan sistemik bagi pendidikan kewarganegaraan yang menumbuhkan rasionalitas publik, bukan sekadar kepatuhan konstitusional. Pendidikan kewarganegaraan, dalam semangat Habermas, harus menjadi fondasi bagi kehidupan demokratis yang hidup, kritis, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, D. N., Abdulkarim, A., Sapriya, S., Rahmat, R. (2023, August). *Improving Civic Intelligence Through Citizenship Education Based on Digital Literature Curriculum*. In *4th Annual Civic Education Conference (ACEC 2022)* (pp. 126-136). Atlantis Press. DOI: <https://doi.org/10.26618/jed.v10i1.17032>

Arnot, M., Casely-Hayford, L., & Yeboah, T. (2018). *Post-colonial dilemmas in the construction of Ghanaian citizenship education: National unity, human rights and social inequalities*. *International Journal of Educational Development*, 61, 117-126. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.12.008>

Ayane, Z. T., & Mihiretie, D. M. (2024). *Developing good person and citizen through civic and ethical education in Ethiopia: A content analysis of secondary school textbooks*. *Social Sciences & Humanities Open*, 10, 100913. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.100913>

Carleheden, M. (2006). *Towards democratic foundations: A Habermasian perspective on the politics of education*. *Journal of Curriculum Studies*, 38(5), 523–542. DOI: <https://doi.org/10.1080/00220270600628229>

Deakin Crick, R., & Joldersma, C. W. (2007). *Lifelong Learning and Citizenship in Habermasian Theory*. *Studies in Philosophy and Education*, 40(2), 201–216. DOI: https://www.researchgate.net/publication/226345175_Habermas_Lifelong_Learning_and_Citizenship_Education

Englund, T. (2006). *Jürgen Habermas and Education. Journal of Curriculum Studies*, 38(5), 501–508. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:209384/FULLTEXT01.pdf>

Finlay, J., Eastman, M., & Kobayashi, L. (2023). “Please don’t let me become a statistic in this grocery store”: Civic engagement among older Americans since the COVID-19 pandemic onset. *Social Science & Medicine*, 337, 116267. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116267>

Finlayson, J. G., & Rees, D. H. (2023). *Jürgen Habermas*. In *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://www.illc.uva.nl/~seop/entries/habermas/>

Gargroetzi, E. C., Zummo, L. M., Aguilar, A. R., & Bene, E. P. (2025). Quantitative civic literacies: “Let’s talk about election 2020” and youth use of numbers in digital civic media. *The Journal of Mathematical Behavior*, 79, 101256. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2025.101256>

Gómez, R. L., & Suárez, A. M. (2023). Pedagogical practices and civic knowledge and engagement in Latin America: Multilevel analysis using ICCS data. *Heliyon*, 9(11). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21319>

Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press.

Habermas, J. (1990). *Moral Consciousness and Communicative Action*. MIT Press.

Habermas, J. (1992). *Autonomy and Solidarity: Interviews with Jürgen Habermas*. Verso.

Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.

Lonto, A. L. (2019). *Students’ Civic Disposition through Learning Civics and Pedagogical Competences of High School Teachers*. *Universal Journal of Educational Research*, 7(12), 35-41. DOI: [10.13189/ujer.2019.071905](https://doi.org/10.13189/ujer.2019.071905)

Lovat, T. (2013). *Jürgen Habermas: Education’s reluctant hero*. In M. Murphy (Ed.), *Social Theory and Education Research* (2nd ed., pp. 180–194). Routledge.

Morrison, K. (2002). *Jürgen Habermas (1929–)*. In *Fifty Modern Thinkers on Education* (pp. 158–162). Routledge.

Sørensen, A. (2015). *From critique of ideology to politics: Habermas on Bildung*. *Ethics and Education*, 15(1), 45–59. DOI: <https://doi.org/10.1080/17449642.2015.1055148>

Susen, S. (2021). *Jürgen Habermas*. In Kivistö, P. (Eds.), *The Cambridge Handbook of Social Theory. Volume I: A Contested Canon*. (pp. 369-394). Cambridge: Cambridge University Press. <https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/25507/1/>

Tytar, O. V., Fradkina, N. V., Havryliuk, Y. R., & Alimova, V.M. (2022). *Philosophy of education and restoration of educational principles in the concept of Jürgen Habermas*. *Theory and History of Culture and Philosophy of Science*, (4), 44–54. DOI: <https://doi.org/10.26565/2306-6687-2022-65-05>